

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SMA DI KECAMATAN TANJUNG  
SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

Muhamad Hattami

Npp 29.1982

*Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : 29.1982@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP)** : Education is an important requirement in the development of human resources, therefore, equal distribution of the quality of education in each region needs to be done to produce quality human resource output. One of the efforts in equalizing the quality of human resources is the policy of accepting new students at the high school level in the Tanjung Selor subdistrict, Bulungan district. **Purpose**: The purpose and objective of this research is to find out the implementation of the new student admission policy of the zoning system at the high school level as well as what factors are obstacles and what efforts can be made to maximize this **Method**.: The method used by the author in conducting applied research is a qualitative description with a deductive approach. Collecting data and information using interviews and documentation. The data analysis technique used the technique of drawing conclusions from Milles and Huberman which included data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Result**: The results showed that the zoning system's new student admission policy at the high school level in Tanjung Selor sub-district was considered quite successful in terms of legalistic and theoretical. **Conclusion**: The suggestions for implementing the zoning system PPDB program are in the form of socialization and education both to policy implementers and policy targets as well as improving facilities and infrastructure as well as the quality of human resources for implementing policies so that the optimization of this policy can be maximized and the expected output of this policy can be realized.

Keywords: implementation concept, education, zoning

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar belakang (GAP)** Pendidikan adalah kebutuhan yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia, maka dari itu pemerataan kualitas pendidikan di tiap daerah perlu dilakukan guna menghasilkan output sumberdaya manusia yang berkualitas. salah satu upaya dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia adalah dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada tingkat sma

di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan. **Tujuan:** Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi pada tingkat SMA serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan hal tersebut **Metode:**Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian riset terapan pemerintahan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pengumpulan data serta informasi menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik penarikan kesimpulan dari Milles and Huberman yang meliputi Reduksi Data, Penyajian Data serta Penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonaasi pada tingkat SMA di kecamatan Tanjung selor dinilai cukup berhasil dari segi legalistik dan teorik. **Kesmpulan:** Implementasi program PPDB sistem zonasi berupa adanya sosialisasi dan edukasi baik kepada pelaksana kebijakan serta target kebijakan serta melakukan peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pelaksana kebijakan agar optimalisasi dari kebijakan ini dapat secara maksimal dan output yang di harapkan dari kebijakan ini dapat terwujud.

Kata kunci : konsep implementasi, pendidikan, zonasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Maju dan tidaknya suatu negara sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan di negara itu sendiri, Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Karakter bangsa sangat besar di pengaruhi oleh kualitas pendidikan, suatu bangsa yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang tinggi tentu akan menghasilkan karakter bangsa yang baik pula. Peran pemerintah tentu sangat di perlukan terhadap segala aspek peningkatan kualitas pendidikan yang berkesinambungan.Sistem zonasi adalah sistem rekrutmen peserta didik dengan penentuan skala radius/ zona yang di tetapkan oleh pemerintah daerah masing- masing, dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi adalah rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk 3 menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar terwujud pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi adalah salah satu upaya yang baik dan tepat dalam pemerataan akses mutu layanan pendidikan . karena pada prinsipnya ialah mendekatkan akses pendidikan ke masyarakat sehingga akan ada efek peningkatan mutu layanan pendidikan di tiap sekolah dan untuk menghilangkan stigma di masyarakat mengenai pengkategorian sekolah favorit dan non favorit.meskipun pada realitanya implementasi pada sistem ini hanya melihat pemerataan dari satu sudut pandang saja yaitu mempermudah bimbingan dan pengajaran meskipun dalam aspek memacu keragaman dan persaingan antar siswa menjadi minim. Pada sistem ini hanya siswa yang berdomisili di sekitaran wilayah sekolah saja yang dapat di terima pada sekolah yang di tuju tanpa melihat aspek intelektualitas.. Saat ini kebijakan sistem zonasi telah diterapkan secara nasional di 3 kecamatan dikabupaten



bulungan salah satunya di Kecamatan Tanjung Selor. Ada 2 sekolah SMA yang menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan Siswa Baru yaitu : SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor Implementasi kebijakan sistem zonasi ini dirasa penting untuk di teliti agar hasil yang di dapatkan dapat di jadikan rujukan bagi sekolah-sekolah di berbagai daerah. Mengacu pada beberapa paparan di atas terkait dengan upaya pemerataan kualitas pendidikan yang di lakukan pemerintah melalui kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Selor”.

## **1.2 KESENJANGAN MASALAH YANG DIAMBIL(GAP)**

Sistem zonasi adalah sistem rekrutmen peserta didik dengan penentuan skala radius/ zona yang di tetapkan oleh pemerintah daerah masing- masing, dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi adalah rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk 3 menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar terwujud pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia Langkah yang cermat serta strategis sangat di perlukan guna upaya peningkatan pembangunan pendidikan dalam mengintegrasikan implementasi kebijakan guna mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan, zonasi diperlukan sebagai integrasi implementasi kebijakan-kebijakan sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. Hal ini akan mewujudkan pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau homogeny secara merata dari Sabang hingga Merauke. Di sinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu upaya dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan bermutu bagi setiap warga Negara (Karmila, Sakira, & Mahir, 2020). Sebagai upaya pemantapan pemahaman mengenai sistem zonasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan utara menerbitkan pedoman teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pelajaran 2021/2022 yang diperkuat dengan peraturan gubernur Kalimantan Utara nomor 25 tahun 2020 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut adalah bentuk turunan atas Peraturan Menteri dalam 4 melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berazaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif, dan berkeadilan. Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi adalah salah satu upaya yang baik dan tepat dalam pemerataan akses mutu layanan pendidikan . karena pada prinsipnya ialah mendekatkan akses pendidikan ke masyarakat sehingga akan ada efek peningkatan mutu layanan pendidikan di tiap sekolah dan untuk menghilangkan stigma di masyarakat mengenai pengkategorian sekolah favorit dan non favorit.meskipun pada realitanya implementasi pada sistem ini hanya melihat pemerataan dari satu sudut pandang saja yaitu mempermudah bimbingan dan pengajaran meskipun dalam aspek memacu keragaman dan persaingan antar siswa menjadi minim. Pada sistem ini hanya siswa yang berdomisili di sekitaran wilayah sekolah saja yang dapat di terima pada sekolah yang di tuju tanpa melihat aspek intelektualitas.

### **1.3 PENELITIAN TERDAHULU**

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu: Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Saharuddin & Khakim, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Gustiana, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMANegeri 6 Bone sudah berjalan cukup baik jika di tinjau dari berbagai dimensi menurut teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, hanya komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil penelitian peneliti yang dikaitkan dengan 4 indikator milik George C. Edward III diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini ditemukan hasil 94 10 penelitian adalah sebagai berikut : (1) Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB telah berjalan dengan efektif karena telah nampak potensi-potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Bone. (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasinya yaitu kurang pemahaman wali murid dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya. Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi (Widyana, 2021). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMANegeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik dan sesuai dengan pedoman Peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Faktor-faktor yang mendorong kebijakan yang sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

### **1.4 PERNYATAAN KEBAHARUAN**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Agustiono, pangaribuan, dkk dimana perbedaan terdapat pada waktu dan lokasi penelitian serta pada penelitian kali ini penulis memfokuskan pada peningkatan mutu sekolah yang menjadi tujuan kebijakan serta penelitian terdahulu hanya dilakukan di satu sekolah sementara penelitian ini dilakukan di dua sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Edward III dengan metode kualitatif deskriptif.

### **1.5 TUJUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma di Kecamatan Tanjung Selor, Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat.



## **II. METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang di landaskan pada filsafat post positivisme, di gunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna dari pada generalisasi, serta teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan dengan melalui penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan mengenai gejala-gejala atau kendala-kendala yang didapat dalam masalah penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikecamatan Tanjung Selor. Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian yang ditunjuk mendeskripsikan fenomenafenomena yang ada. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang akan diteliti, serta mampu menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan agar memberi gambaran secara jelas mengenai masalah 275 28 yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikecamatan Tanjung Selor.

## **III. HASIL TEMUAN**

### **3.1 ANALISIS FOKUS KAJIAN**

Analisis fokus Penelitian ialah suatu hasil analisa yang selanjutnya akan dibahas dan menjadi bahan dalam penarikan kesimpulan terhadap suatu variable-variabel fokus penelitian yang sebelumnya didapatkan selama pelaksanaan magang di lokasi magang Kelurahan Kota Batam yang didukung fakta-fakta terkini yang didapatkan melalui metode yang digunakan.

#### **3.1.1 FOKUS KAJIAN LEGALISTIK**

Sesuai dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah 59 Menengah Kejuruan. Yang di tindak lanjuti melalui Pergub Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa. tujuan kebijakan system zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan dimana setiap siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi, intelektual dan lain-lain dapat memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal nya sehingga kemungkinan kecil siswa-siswa dengan intelektual diatas rata-rata akan berebut di satu sekolah karena sudah di tetapkan zonanya. Lebih lanjut beliau menjelaskan:“jadi setiap tahun sudah ada panitia yang bertugas sebagai pelaksana ppdb yang bertugas mengawasi pelaksanaan ppdb di tiap sekolah serta memberikan hal teknis seperti pembagian zona serta kuota sekolah yang di sesuaikan dengan daya tamping sekolah karena ppdb tahun ini melalui 4 jalur yakni zonasi, afirmasi, pemindahan tugas orang tua dan jalur prestasi meskipun yang terbesar persentase nya ada di zonasi yakni 50 persen dari daya tamping sekolah” 60 Dari pernyataan yang di sampaikan kepala bagian Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Utara Disdikbud Kalimantan Utara sebagai penyelenggara PPDB mengatur hal-hal teknis yang mendukung pelaksanaan PPDB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3.1.2 FOKUS KAJIAN TEORITIK

Dalam upaya analisis penelitian yang peneliti ambil dari perspektif teoretis, peneliti menggunakan konsep implementasi dari Goerge Edwards III. Dalam (Ali 2017:131) dijelaskan bahwa konsep Implementasi Edwards III tersebut terdapat 4 (empat) variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Kemudian setiap variabel terdiri dari beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Komunikasi 2. Disposisi 3. sumber daya 4. Struktur Birokrasi

#### 1. komunikasi

Kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sebelum dilaksanakan perlu dilakukan persiapan yang matang. Salah satunya yaitu dengan mengedukasi sekolah-sekolah SMA sederajat dan juga masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan membagikan informasi seputar sistem zonasi melalui web resmi disdik dan media sosial. 61 Pengetahuan yang disampaikan berkaitan dengan aturan dan teknis pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kalimantan Utara. Web dan juga media sosial yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dapat diakses dengan mudah dan bersifat transparan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomer 25 tahun 2020. Kemudahan akses dalam mendapatkan informasi terkait zonasi PPDB mendorong calon peserta didik untuk lebih banyak mencari informasi secara mandiri. Meski demikian kegiatan sosialisasi dilakukan oleh pihak sekolah baik dari SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor untuk menambah pengetahuan calon peserta didik. Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan pihak sekolah sudah tergolong baik dimana dibuktikan dengan pemahaman calon peserta didik yang melakukan pendaftaran sesuai dengan sistem zonasi yang telah ditetapkan. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan selain menambah informasi bagi calon peserta didik, juga memuat informasi yang berguna sebagai pedoman teknis bagi sekolah SMA sederajat dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB. Penyampaian informasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah dikoordinasi secara lancar disertai dengan kegiatan surat menyurat secara terbuka dan transparan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan langsung dilapangan, proses Sosialisasi PPDB dilakukan oleh Disdikbud Kalimantan Utara mulai 62 dari informasi penetapan wilayah zonasi waktu pelaksanaan serta pedoman teknis dilaksanakan secara transparan baik melalui surat menyurat melalui sekolah serta sosialisasi secara massif oleh Disdikbud Kalimantan Utara. Berdasarkan pada pengamatan peneliti, terselenggaranya komunikasi yang dilakukan terkait PPDB sistem zonasi sesuai dengan teori yang digunakan peneliti sebagai landasan teoritik pada fokus penelitian yaitu salah satunya komunikasi.

#### 2. Disposisi

Menurut Bagian pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, pelaksana kebijakan dalam hal ini dinas dan Pendidikan sudah mengetahui dari segi aturan dan teknis. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor juga mengatakan bahwa sikap penyelenggara PPDB sudah sesuai aturan. Perwakilan siswa se-SMA Tanjung selor juga berkata bahwa panitia PPDB sudah melaksanakan PPDB dengan berkeadilan karena pembagian zona sudah jelas dan calon peserta PPDB harus melampirkan bukti domisili yang sesuai dengan pembagian zonasi. permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan yaitu dengan dengan pembentukan panitia PPDB setiap tahun oleh pihak sekolah dan diawasi oleh Dinasa Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara



### 3. Struktur Birokrasi

Panitia pelaksana PPDB baik dari disdikbud maupun dari sekolah memiliki struktur kelembagaan yang jelas. Mulai dari coordinator sampai anggota memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagian pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Ibu Oktari Agies, S.STP yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 10:30 WITA mengatakan: 71 “Panitia pelaksana PPDB sudah jelas ditetapkan setiap tahunnya dan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing misalnya kami dari dinas pendidikan yang membuat pedoman teknis serta pembagian wilayah zonasi sedangkan pihak sekolah yang melakukan penyaringan wilayah berdasarkan data real di lapangan jadi struktur kelembagaannya sudah jelas karena ini berkaitan dengan dinas” Wawancara dengan Kepala sekolah SMAN 1 Tanjung Batak Didik Sukanto, M.Pd mengatakan: “Panitia PPDB secara keorganisasian sudah di bentuk setiap tahunnya jadi sudah jelas juga tugas dan fungsinya supaya tidak ada yang double job”. Dan dengan kepala sekolah

SMAN 2 Tanjung Selor mengatakan : “Struktur organisasi dalam PPDB di SMAN 2 sudah kami tetapkan sebelum pelaksanaan PPDB dan secara kepanitiaan sudah jelas” Penulis juga mewawancarai perwakilan gur, wawancara dengan Ibu Nurhayati, S.Pd (guru SMAN 1) mengatakan: “Struktur Organisasi dalam kepanitiaan PPDB sudah jelas sudah dibagi semua tugas pokok dan fungsinya masing-masing”. Dan Irfan Ardian, S.Pd (guru SMAN 2) mengatakan: “Kalau PPDB sudah ada panitia nya ditunjuk langsung oleh kepala sekolah” Perwakilan siswa SMAN 1 Andrea Ardiansyah mengatakan: “Panitia PPDB nya sudah ada ketika saya mendaftar dan sudah jelas juga misalnya Guru A yang bertugas di bagian pengambilan formulir dan lain-lain” dan Putri Amalia sebagai perwakilan siswa SMAN 2 mengatakan : “Kepanitiaan PPDB di SMAN 2 dari organisasi dan pembagian tugas sudah baik saya juga merasakan dampaknya saat mendaftar kemarin” 72 Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi secara kelembagaan sudah berjalan dengan baik dimana ada kejelasan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bidang sehingga dapat memudahkan dalam hal koordinasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB sistem zonasi

### 4. Sumber daya

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan proses implementasi program. Dapat dikatakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia. Tantangan dari zonasi adalah pada karakter dari siswa itu sendiri. Siswa sistem zonasi cenderung lebih mengabaikan nilai-nilai karakter. Siswa memiliki sikap yang kurang bertanggungjawab, kurang memiliki sikap sopan santun dan adab yang baik terhadap guru. Siswa sering mengabaikan arahan guru dan sulit dikendalikan ketika pembelajaran berlangsung, siswa banyak yang menghiraukan perintah guru untuk tertib dan disiplin. Banyak siswa yang celometan dengan guru, mengabaikan tugas yang diberikan guru, tidak hormat dengan guru dan sering bergurau dengan teman hingga memancing keributan. Kedua, guru berupaya untuk membenahi karakter siswa kelas sepuluh dengan cara memberi pengetahuan untuk menerapkan gerakan 5S. Gerakan tersebut lebih ditekankan oleh guru terhadap siswa kelas tujuh dan lebih diberikan pengawasan yang ketat serta guru bisa langsung memberikan hukuman jika tidak patuh pada aturan tersebut. Guru akan memberikan punishment pada siswa yang berkarakter kurang baik dengan 70 tujuan mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Siswa yang telah diketahui melakukan sebuah pelanggaran maka akan diberikan punishment tersebut dan guru melakukan konseling individu dan bimbingan kelompok pada siswa. Konseling individu

dilakukan kepada siswa yang memiliki permasalahan baik dari segi perilaku maupun dalam proses pembelajaran. Bimbingan kelompok dilakukan kepada kelompok siswa yang mengalami permasalahan kesulitan belajar dengan cara memberikan tambahan pelajaran diluar jam pelajaran. Kegiatan-kegiatan keagamaan diberikan sebagai penguatan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam diri siswa. Sehingga siswa memiliki keinginan untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Sistem zonasi memberikan imbas positif bagi guru. Karena karakter siswa-siswanya yang unik dan kompleks untuk dididik yang tentunya tidak sama dengan siswa yang dihasilkan melalui seleksi akademik. Pada akhirnya mampu meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kretifitas bagi dirinya.

### **3.3 DISKUSI TEMUAN UTAMA PENELITIAN**

dalam pelaksanaan kebijakan Sistem rekrutmen yang lebih menekankan jarak pada penerimaan peserta didik baru memiliki berbagai masalah fundamental antara lain:

#### **1. Pembagian wilayah zonasi**

Kondisi Kecamatan tanjung Selor yang hanya memiliki dua SMA Negeri sering menimbulkan masalah terutama untuk para calon siswa yang memiliki tempat tinggal di pertengahan sebagaimana yang diungkapkan kepala Bagian pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Ibu Oktari Agies, S.STP yang dilakukan pada 07 Januari pukul 10:30 WITA mengatakan: “seringkali yang menjadi buah bibir di masyarakat adalah untuk mereka yang memiliki tempat tinggal di pertengahan kedua SMA di tanjung selor atau mereka yang tinggal di perbatasan desa atau kelurahan, karena pembagian zona yang kami lakukan berbasis data domisili per desa/kelurahan, maka dari itu kami selalu menupayakan agar hal-hal seperti ini dapat dicari jalan keluarnya seiring berjalan nya waktu”. Kepala Sekolah SMAN 1 Bapak Didik Sukanto mengatakan : “Pembagian wilayah zonasi ini kadang menjadi masalah juga karena dari petunjuk teknis yang dibuat hanya berbasis data desa dan kelurahan bukan 73 koordinat berdasarkan jarak real”. Dan Kepala sekolah SMAN 2 Tanjung selor mengatakan: “masalah jarak ini kan di pedoman teknis hanya diberikan berdasarkan desa/kelurahan jadi untuk yang domisilinya di ujung desa/kelurahan kadang ada tidak bisa daftar ke sekolah yang lebih dekat karena beda kelurahan” Perwakilan guru SMAN 1 Tanjung Selor Ibu Nurhayati,S.Pd mengatakan : “Masalah pembagian zona kadang juga tidak adil bagi semua siswa mungkin kedepannya dapat diubah dengan mengacu pada koordinat maps saja” dan perwakilan guru SMAN 2 bapak Irfan Ardian Tanjung Selor mengatakan: “Zona sekolah ini mungkin yang menjadi masalah apalagi kondisi di tanjung selor yang hanya ada dua SMA negeri” Perwakilan siswa SMAN 1 Tanjung Selor Andre Ardiansyah mengatakan : “Masalah pembagian zona ini jadi sebagian siswa karena ada beberapa siswa yang tidak dapat sekolah di sma 1 pkarena desa/kelurahannya tidak masuk wilayah zonasi SMAN 1 padahal secara jarak lebih dekat ke SMAN 1” dan perwakilan siswa SMAN 2 Tanjung Selor Putri Amalia mengatakan : “masalah pembagian zona ini maslah juga terutama yang domisilinya di ujung desa/kelurahan, se,oga selanjutnya dapat di perbaiki”. Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa masalah jarak pembagian zonasi sekolah terjadi karena basis data yang digunakan adalah wilayah domisili desa/kelurahan bukan menggunakan data real jarak tempuh dari sekolah menuju tempat tinggal siswa. 74

#### **2. Standar kompetensi pendidik**

Hambatan lainnya yang sering di hadapi ialah kemampuan pengajar yang dirasa ada kesenjangan antar sekolah yang satu dengan yang lain. Hal ini disampaikan kepala bagian pembinaan SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Ibu Oktar



Agies, S.STP : “salah satu hambatan yang sering terjadi bukan hanya di kecamatan Tanjung Selor tapi di banyak tempat juga mengalami hal yang sama, sistem zonasi tujuannya bagus hanya saja perlu diperhatikan dari segi persebaran sekolah dan tenaga pengajar nya”. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor Bapak Didik Sukanto, M.Pd mengatakan : “Salah satu masalah dalam zonasi adalah permasalahan pada kompetensi tenaga pengajar saya rasa ini juga terjadi di daerah lain bukan hanya di Tanjung Selor”. Dan pendapat dari Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor Bapak Eko Purwanto, M.Pd mengatakan : “Standar kompetensi pengajar masih menjadi masalah dalam sistem zonasi karena tiap sekolah berbeda karena tentunya setiap orang tua ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya”. Wawancara dengan Perwakilan guru SMAN 1 Tanjung Selor dengan Ibu Nurhayati, S.Pd mengatakan: “Kualitas SDM tenaga pengajar masih menjadi masalah karena menjadi tolak ukur bagi beberapa siswa atau orang tua siswa dalam memilih sekolah”. Dan perwakilan guru SMAN 2 Tanjung Selor Bapak Irfan Ardian, S.Pd mengatakan: “Kompetensi guru juga harus di tingkatkan agar PPDB sistem zonasi menghasilkan output 75 sesuai dengan yang diinginkan”. Perwakilan siswa SMAN 1 Andre ardiansyah berpendapat: “Masalah Kompetensi guru dan fasilitas sekolah biasanya jadi pertimbangan ketika memilih sekolah dengan sistem zonasi harus ada peningkatan agar setiap siswa tidak terbebani dengan sistem ini”. Dan perwakilan SMAN 2 Tanjung Selor Putri Amalia mengatakan: “Hal ini juga menjadi masalah bagi saya kami mengupayakan nilai yang baik ketika ujian di SMP sampai ikut les agar dapat masuk sekolah favorit tapi dengan sistem ini kami tidak dapat memilih”. Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan sistem rekrutmen yang mengesampingkan nilai ujian nasional dan tanpa melalui tes kompetensi tentu memungkinkan adanya kemampuan siswa yang heterogen dalam satu sekolah perlu dilakukan upaya agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh siswanya, maka dari itu kompetensi tenaga pengajar menjadi poin penting dalam implementasi PPDB sistem zonasi ini.

Dalam mengatasi faktor penghambat yang telah di jelaskan sebelumnya pelaksana kebijakan dalam hal ini pihak sekolah melakukan upaya antara lain :

1. Melakukan pengecekan secara real terhadap alamat domisili, sebagaimana yang di jelaskan kepala Bagian Pembinaan SMA Dinas 76 Pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Ibu Oktari Agies, S.STP mengatakan: “Untuk yang alamat domisili nya di perbatasan desa/ kelurahan atau yang berada di pertengahan kami melakukan pengecekan real terhadap jarak ke sekolah hal ini baru kami lakukan tahun ini sebagai bentuk evaluasi kami dari tahun-tahun sebelumnya” . Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor bapak Didik Sukanto, S.PD mengatakan : “Terkait dengan masalah pembagian zonasi salah satu upaya kami pihak sekolah adalah dengan melakukan pengecekan secara real selain itu selain kuota zonasi juga ada kuota prestasi ya walaupun tidak banyak” Wawancara pada Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor Bapak Eko purwanto, S.STP mengatakan : “Salah satu upaya kami dalam mengatasi masalah pembagian zona kami hanya memberikan masukan kepada dinas pendidikan karena yang membagi zona ini kan kewenangan mereka kami hanya melaksanakan” Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya dinas pendidikan dan pihak sekolah melakukan pengecekan real jarak serta memberikan masukan kepada dinas pendidikan sebagai pembuat kebijakan agar PPDB yang di laksanakan adil bagi semua pihak.
2. Upaya lain yang dilakukan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik sebagaimana 77 yang dikatakan oleh Kepala bagian pembinaan SMA disdikbuk Kalimantan Utara Ibu Oktari Agies, S.SPD yang dilakukan pada tanggal 07 Januari pukul 10:30 WITA mengatakan : “Terkait dengan kompetensi tenaga pengajar kami melakukan upaya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para guru tingkat SMA

salah satunya adalah program Teacher learning center yang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir dengan harapan pada peningkatan kualitas tenaga pengajar” Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor Bapak Didik Sukanto, M.Pd mengatakan : “Dalam hal peningkatan kompetensi guru sudah ada upaya-upaya dari dinas pendidikan melalui pelatihan-pelatihan, kami dari pihak sekolah selalu mendukung adanya upaya tersebut” dan Kepala sekolah SMAN 2 Tanjung selor Bapak Eko Purwanto, M.Pd mengatakan : “Untuk meningkatkan kompetensi pengajar kami kami mengikuti program-program pelatihan dari dinas pendidikan dan kami meminta kepada para guru untuk dapat berkreasi dalam mengajar, mengingat siswa dengan kemampuan yang beda-beda” wawancara dengan Perwakilan guru SMAN 1 Ibu Nurhayati,S.Pd mengatakan: “Upaya kami sebagai tenaga pengajar adalah meningkatkan kualitas diri melalui belajar mandiri serta mengikuti pelatihan yang dibuat dinas terkait”. Dan perwakilan guru SMAN 2 Tanjung Selor Bapak Irfan Ardian,S.Pd mengatakan: “ Upaya kami sebagai tenaga pengajar dalam meningkatkan kompetensi dengan mengikuti program pelatihan yang dibuat dinas pendidikan dan melalui belajar mandiri”. 78 Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya dari Dinas terkait yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada tenaga pengajar diantaranya adalah program teacher learning center yang dilakukan dinas pendidikan yang bekerja sama dengan PSF-SDO yang didalamnya akan dibentuk sebuah sistem pengembangan dan pembinaan guru secara terstruktur dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang sejalan dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru. Serta upaya dari pihak sekolah dengan mendukung setiap kegiatan dinas pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas guru serta upaya lain dari para guru adalah dengan berkreasi dalam mengembangkan diri.

#### IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMA di kecamatan Tanjung Selor masih belum optimal. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan pendekatan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. perlu dilakukan evaluasi terkait dengan teknis pelaksanaan terutama pada adius zonasi serta peningkatan kompetensi pada tenaga pengajar.
2. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kebijakan sistem zonasi a. Faktor pendukung a) Sumber daya yang memadai b) Sarana dan prasarana c) Anggaran b. Faktor penghambat a) Masalah pembagian wilayah zonasi b) standar kompetensi tenaga pengajar
3. Upaya yang dilakukan Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan utara dalam mengatasi faktor penghambat pembagian 79 80 wilayah zonasi yang kurang optimal yakni dengan memberikan arahan kepada pihak sekolah untuk melakukan pengecekan real titik koordinat calon siswa dengan domisili di perbatasan desa/ kelurahan. Dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yaitu dengan mengadakan program-program pelatihan serta secara mandiri para guru berkreasi dalam mengembangkan diri. serta secara perlahan mengupayakan kesamarataan fasilitas antar sekolah melalui alokasi dana BOS

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada



lokasi serupa berkaitan implementai kebijakan PPDB sistem zonasi di kecamatan tanjong selor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gustiana. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Karmila, M., Sakira, N., & Mahir. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. . Institut Agama islam Negeri.

